



04 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sul Sel
Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Di_

Makassar

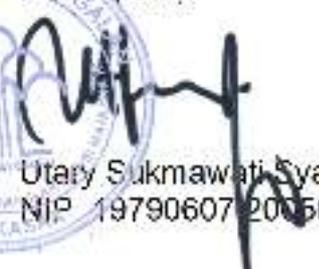
SURAT PENGANTAR

Nomor : W.23.AHU. AHU.1.PR.03 - 2 /2022

No	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kantor BHP dan Kurator Negara Makassar	1 (satu) Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Pengirim tanggal.....
Penerima,

NIP.
No. HP/Telepon

Pengirim,
Fit. Kepala,

Utary Sukmawati Syarif
NIP 197906072005012002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;



Kementerian Hukum dan HAM
Kanwil Sulawesi Selatan
Balai Harta Peninggalan Makassar

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Balai Harta Peninggalan Makassar
Jalan A.P. Pettarani Nomor 112
Telp. (0411) 453 281 Fax. (0411) 453 219 Makassar
Email : bhpmakassar@gmail.com



DAFTAR ISI.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Permasalahan dan Capaian.....	7
E. Maksud dan Tujuan.....	12
F. Landasan Hukum.....	13
G. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Kinerja dan Anggaran.....	15
B. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Capaian Kinerja 2022.....	36
B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran).....	92
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran/Rencana Tahun akan Datang dan Tindak Lanjut.....	98



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui laporan kinerja ini berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini, kami sampaikan ucapan terima



kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Makassar, 04 Januari 2023

Plt.Kepala

Utary Sukmawati Syarif

NIP. 19790607 200501 2 002



IKTISAR EKSEKUTIF

Salah satu wujud pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan wujud pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu organisasi/instansi Pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara periodik (akhir tahun) yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Harapan dari kinerja yang berhasil adalah ketika sasaran/target dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan kemanfaatannya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian penyusunan laporan memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, dimana Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan salah satu bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, maka Balai Harta Peninggalan Makassar melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum di wilayah dan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien. Output sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum di wilayah
- b. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien.

Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:

- Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum;
- Persentase penyelesaian Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

Sasaran peningkatan kualitas administrasi yang tepat waktu dan akuntabel diukur melalui indikator kinerja. Sasaran terselenggaranya Administrasi Hukum Umum di Wilayah diukur melalui indikator kinerja, antara lain :

Dari sasaran Penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum target **84 %** dalam 12 bulan dapat terealisasi 12 bulan atau terealisasi mencapai **98.63%** dan sasaran Penyelesaian Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP target **90%** dalam 12 bulan dapat terealisasi mencapai **100%**.

Secara umum capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar telah tercapai sesuai target sehingga dapat dikatakan kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai sasaran dan target yang diharapkan. Sedangkan untuk ***Realisasi Anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 5.915.596.315,- mencapai rata-rata 93.37% dari total anggaran sebesar Rp. 6,335,699,000,-*** Dari indikator-indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang



tercapai maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dan Unit Eselon II dan Unit Eselon I;
- 2) Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
- 3) Perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yg lebih matang.

Untuk itu BHP Makassar akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Umum

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan seluruh instansi untuk melaporkan LKjIP. Dalam LKjIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Harta Peninggalan Makassar beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asais Manusia RI dan difokuskan pada Pencapaian Kinerja selama Tahun 2022.

Balai Harta Peninggalan Makassar yang merupakan Unit/Satuan Kerja Mandiri (Eselon III) berkewajiban membuat LKjIP, yang mengacu pada Rencana Strategis



Kementerian Hukum dan HAM RI. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif.

2. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan teknis berkoordinasi langsung ke Unit Eselon I, yaitu Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu:

- Balai Harta Peninggalan Medan
- Balai Harta Peninggalan Jakarta
- Balai Harta Peninggalan Semarang
- Balai Harta Peninggalan Surabaya
- Balai Harta Peninggalan Makassar

Balai Harta Peninggalan Makassar mempunyai wilayah kerja meliputi 13 (tiga belas) propinsi, antara lain: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan lebih terperinci adalah sebagai berikut :

- a) Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata).
- b) Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348, 449 K. U. H. Perdata).
- c) Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata).
- d) Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H. Perdata jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- e) Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata jo. pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- f) Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- g) Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala



Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

- h) Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan/tidak diketahui (Pasal 37 ayat 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana).
- i) Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat. (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

3. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah uraian tugas masing-masing dari unsur pada Susunan Organisasi yang ada pada Balai Harta Peninggalan Makassar:

Susunan organisasi BHP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Harta Peninggalan Wilayah I;
- d. Seksi Harta Peninggalan Wilayah II;
- e. Seksi Harta Peninggalan Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

NO	STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
1	Kepala	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan.



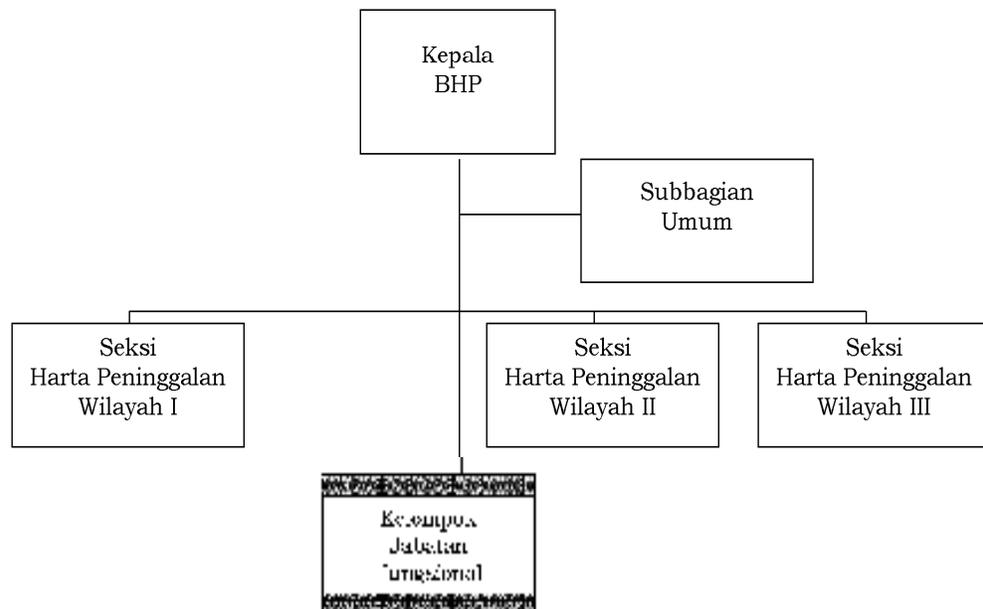
2	Kepala Sub Bagian Umum	Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP..
3	Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	Melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (<i>afwezigheid</i>), harta peninggalan yang tidak terurus (<i>onbeheerde nalatenschap</i>), pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP.
4	Kelompok Jabatan Fungsional	mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah ini adalah bagan Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan:.

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI HARTA PENINGGALAN



4. Permasalahan dan Capaian

NO	Sub Organisasi	Permasalahan Tahun 2021
1	Sub Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none">Masih kurangnya pemahaman pelaksana di bagian lain mengenai tata persuratan, sehingga masih sering terjadi pencarian berkas yang kurang maksimal;Pemanfaatan email dinas sering mengalami hambatan karena kurangnya



JFU yang khusus menangani bidang tersebut, sehingga dalam penerimaan dan pengiriman surat keluar secara elektronik masih sering tidak terlaksana

- Masih kurangnya pegawai dan Pemahaman pelaksana di bagian pelaporan keuangan,Kepegawaian dan Umum
- Adanya pembaruan sistem rekonsiliasi Operator SAIBA dengan KPPN terhambat, dan harus menyesuaikan Jadwal yang diberikan oleh KPPN, sehingga tidak setiap bulan dilakukan Rekonsiliasi dengan KPPN;
- Kurang matangnya perencanaan anggaran sehingga sering dilakukan revisi RKAKL
- Pada awal tahun 2021 terdapat Pandemi covid-19 sehingga pegawai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian dikarenakan pegawai melaksanakan dengan system Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), dengan adanya pandemic ini sistem absensi melalui aplikasi online dan bentuk pengawasannya kurang maksimal ;
- Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG masih terhambat dengan tidak adanya evaluasi
- Arsip masih dalam proses pembenahan dan belum maksimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang cara pengarsipan sesuai standar yang berlaku dan kurangnya SDM dalam pengelolaan arsip;



		<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan rencana anggaran menyebabkan terbatasnya usulan pengajuan belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka menunjang kinerja pegawai dan fasilitas perkantoran, sedangkan sangat diperlukannya masa penghapusan peralatan dan mesin yang cukup banyak
2	Seksi Harta Peninggalan Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya penambahan Tugas Fungsi BHP, namun masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan:<ul style="list-style-type: none">• Selaku Penampung Dana / Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan / tidak diketahui; Surat mengenai Petunjuk Pelaksanaan Transfer Dana tersebut belum ada.• Selaku Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Alhiwaris dan Wasiat. Surat mengenai Petunjuk Pelaksanaan tersebut belum ada.2. RUU BHP yang sedang dalam proses, salah satu perubahannya yaitu pemberlakuan pengurusan yang terkait dengan BHP untuk seluruh Warga Negara Indonesia, tidak dibatasi oleh adanya golongan / keturunan. Namun sampai dengan saat ini masih belum selesai diajukan, sehingga



		<p>benturan-benturan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan Balai Harta Peninggalan dengan peraturan perundang-undangan lain, menyebabkan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan tidak maksimal dan mengalami banyak kendala;</p> <p>3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum bagi masyarakat, karena ketidaktahuan instansi terkait mengenai eksistensi dan peran BHP;</p> <p>4. Tidak adanya loket khusus pembayaran bagi pemohon yang ingin melakukan pembayaran PNBK layanan Balai Harta Peninggalan</p>
--	--	---

NO	Sub Organisasi	Hasil Yang Dicapai Tahun 2022
1	Sub Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhinya Pelaporan Target Kinerja, Penyelenggaraan SPIP dan LKIP;• Terjaminnya keamanan dan kebersihan kantor, dengan adanya petugas khusus;• Penggunaan email dinas sebagai saran komunikasi dan informasi dengan tingkat Kementerian dan Kantor Wilayah;• Penyusunan Program dan Anggaran telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan,



		<p>diantaranya pelaksanaan Tusi Pelayanan Hukum, Operasional Perkantoran dan Pembayaran Gaji Pegawai;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam hal penggunaan Aplikasi GPP dan SPM sudah berjalan baik dan menghasilkan laporan setiap bulannya;• Pengelolaan Laporan Keuangan melalui SAIBA yang menghasilkan Laporan Semesteran dan Tahunan;• Pengelolaan Pembayaran Tunjangan Kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, baik dalam tahap pengusulan hingga pertanggung- jawaban kepada Unit Eselon II/Kantor Wilayah;
		<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan Aplikasi SIMPEG, khususnya dalam pengisian Jurnal Harian yang terhubung langsung dengan Penilaian SKP;• Pengajuan dan pemberian Cuti Pegawai sudah melalui aplikasi SIMPEG;• Semakin ketatnya pembinaan disiplin pegawai, terutama dalam hal absensi pegawai;
		<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Pemeliharaan/Perawatan Inventaris Kantor;



		<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya rekonsiliasi internal dari Operator SIMAK BMN dan Operator SAIBA;• Terlaksananya pelaporan inventaris SIMAK BMN setiap Semester dan periode Tahunan;• Terpenuhinya Kebutuhan Barang Persediaan untuk kelancaran administrasi kantor;• Terlaksananya Usulan Penghapusan yang disertai Rencana Anggaran Belanja Modal sebagai penganti;
2	Seksi Harta Peninggalan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan fasilitas berupa Ruang khusus dalam Pelayanan Konsultasi Hukum, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menerima informasi, serta disediakan media informasi berupa buku saku mengenai Tusi BHP, dan buku tamu, sehingga pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Hukum berjalan baik;• Terlaksananya program digitalisasi Arsip sehingga arsip yang mulai rusak bias diselamatkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Balai Harta Peninggalan Makassar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan



sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Balai Harta Peninggalan Makassar diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pencapaian target kinerja tahun 2022, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan pada Tahun 2022 agar sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk: (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,(2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang,(3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



C. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 19 Juni 1980 Nomor: M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar ;

1. **Bab I Pendahuluan.**



Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, Landasan Hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Harta Peninggalan Makassar.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.**

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020 – 2024, Perencanaan Kinerja Tahun 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja.**

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Pada Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Bab II ini akan menyajikan Perencanaan Strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

1. Visi, Misi dan Tata Nilai

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan



hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke



- kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
 4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:



1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas.
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **"PASTI"** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang



mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara



yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

- 4) Misi melaksanakan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 5) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- 6) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
- 7) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.



Hubungan Antara Misi dan Tujuan

NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional,	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi,
2	Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik,	Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum
3	Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional,	Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional,
4	Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan,



5	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional.	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional.
---	---	---

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
- 3) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public.
- 4) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- 5) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 7) Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.



- 8) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2022, antara lain

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,	Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan,	Indeks kualitas perundang-undangan
2	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
3	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan	Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti



<p>pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang</p>		<ol style="list-style-type: none">2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas3. Persentase menurunnya residivis4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
---	--	---



	melintas dan tinggal di Indonesia.		
4	Terlindunginya hak asasi manusia,	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
5	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani



			<ul style="list-style-type: none"> 5. sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Indeks 7. kepuasan layanan bantuan hukum
6	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT. 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
7	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> 1. ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. 2. Persentase alumni diklat yang meningkat
8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi



4. Program dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Balai Harta Peninggalan Makassar hanya melaksanakan 1 (satu) program, dari Unit Eselon I yaitu Direktorat Administrasi Hukum Umum. Adapun rincian Pagu Anggaran Semula Tahun Anggaran 2022 dan Pagu Anggaran Setelah Revisi Tahun 2022 sebagai berikut:

Pagu Anggaran Semula dan Setelah Revisi Tahun Anggaran 2022

No	Program	No Dan Tgl DIPA	Pagu Semula (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Pelaksana
1	Program Administrasi Hukum Umum	Nomor SP DIPA-013.03.2.40 8432/2022 Tanggal 17 November 2022;	6,335,699,000,-	6,335,699,000,-	Balai Harta Peninggalan Makassar

Catatan) : Revisi DIPA dan POK yang dilaksanakan tidak merubah nilai pagu anggaran*

5. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang



ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Unit Kerja : Balai Harta Peninggalan Makassar
Program : Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.000.000.000
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 1.000.000.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.335.699.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.335.699.000,-



Adapun secara rinci alokasi anggaran pada Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan **NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408432/2022** Tanggal 17 November 2022; dapat dilihat dari data dibawah ini:

Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen	Anggaran DIPA Awal (Rp.)	Anggaran DIPA-Revisi (Rp.)
Program 013.03.07: Program Administrasi Hukum Umum	Rp. 6.335.699.000	Rp.6.335.699.000,-
Kegiatan 5251: Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
Output 5251.004:	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
Koordinasi Koordinasi BHP dengan instansi terkait	Rp. 158,988,000	Rp. 158,988,000
051 Koordinasi dengan instansi terkait	Rp. 96,420,000	Rp. 112,570,000
052 Koordinasi dengan unit pusat	Rp. 62,568,000	Rp. 46,418,000
Layanan BHP		
Komponen: 051. Layanan Perwalian dan Pengampuan	Rp. 446,655,000	Rp. 462,873,000
Sub Komponen:		
A. Pengurusan Perwalian	Rp. 349,950,000	Rp. 443,088,000
B. Pengurusan Pengampuan	Rp. 96,705,000	Rp. 19,785,000
052. Layanan Pengurusan Ketidakhadiran dan Harta yang tidak ada kuasanya / harta tak terurus.	Rp. 56,360,000	Rp. 25,168,000
Sub Komponen :		
A. Pengurusan Harta kekayaan yang dinyatakan tak hadir.	Rp. 28,180,000	Rp. 150,000
B. Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus	Rp. 28,180,000	Rp. 25,018,000
053. Layanan pendaftaran surat Keterangan wasiat (SKW) dan surat keterangan Hak Mewaris (SHM)	Rp. 38,460,000	Rp. 25,018,000
Sub Komponen :		
A. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)	Rp. 19,180,000	Rp. 150,000
B. Pendaftaran dan Pembukaan Surat Wasiat	Rp. 19,280,000	Rp. 12,060,000



054. Layanan kepailitan dan PKPU	Rp. 30,020,000	Rp. 158,538,000
Sub Komponen :		
A. Kurator dan Kepailitan	Rp. 28,850,000	Rp. 157,938,000
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Rp. 1,170,000	Rp. 600,000
055. Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga	Rp. 39,040,000	Rp. 19,966,000
Sub Komponen :		
A. Penampungan Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Har Tua	Rp. 19,760,000	Rp. 19,666,000
B. Penampung Dana dalam Hal pengirim maupun penerima tidak diketahui	Rp. 19,280,000	Rp. 300,000
056. Sosialisasi/ diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Webinar/ work shop /pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah	Rp. 149,151,000	Rp. 83,844,000
Sub Komponen :		
A. Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah	Rp. 149,151,000	Rp. 83,844,000
057. Publikasi/pameran/helpdesk Tanpa Sub Komponen	Rp. 81,326,000	Rp. 78,413,000
Output 5251.994:		
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 5,335,699,000	Rp. 5,335,699,000
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]		
Layanan BMN	Rp. 36,636,000	Rp. 36,636,000
051. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	Rp. 25,236,000	Rp. 25,236,000
052. Pengadaan BMN	Rp. 11,400,000	Rp. 11,400,000
Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 3,600,000	Rp. 3,600,000
051. Pengelolaan Kehumasan dan TI	Rp. 3,600,000	Rp. 3,600,000
Output 5251.994		
Layanan Umum		
051. Layanan Urusan Kerumahtanggaan Sub.Komponen	Rp. 461,586,000	Rp. 461,586,000
A. rumah tangga Pelaksanaan layanan urusan tangga	Rp. 362,020,000	Rp. 362,020,000
B. Pencegahan dan penanganan Covid-19	Rp. 99,566,000	Rp. 99,566,000
Layanan Perkantoran	Rp. 3,086,901,000	Rp. 3,086,901,000
001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,147,459,000	Rp. 2,147,459,000



Sub Komponen:		
A. Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp. 2,129,867,000	Rp. 2,129,867,000
B. Uang Lembur	Rp. 17,592,000	Rp. 17,592,000
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 939,442,000	Rp. 939,442,000
Sub Komponen :		
A. Kesehatan Pegawai	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
B. Pakaian dinas pegawai	Rp. 54,200,000	Rp. 54,200,000
C. Pemeliharaan gedung	Rp. 188,914,000	Rp. 188,914,000
D. Pemeliharaan peralatan perkantoran	Rp. 34,300,000	Rp. 35,300,000
E. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp. 72,150,000	Rp. 72,150,000
F. Langganan Daya dan Jasa	Rp. 130,800,000	Rp. 121,200,000
G. Jasa Pos	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
H. Keperluan Kantor	Rp. 351,020,000	Rp. 346,220,000
I. Honor Operator Satker	Rp. 85,320,000	Rp. 85,320,000
J. Jamuan Tamu	Rp. 10,238,000	Rp. 23,638,000
Output 5251.951: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 1,523,984,000	Rp. 1,523,984,000
Sarana Internal Layanan	Rp. 613,500,000	Rp. 613,500,000
051. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 102,000,000	Rp. 102,000,000
052. Kendaraan Bermotor		
A. <i>pengadaan Mobil</i>	Rp. 450,000,000	Rp. 450,000,000
053. Peralatan Fasilitas Perkantoran		
A. <i>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>	Rp. 61,500,000	Rp. 61,500,000
Layanan Prasarana Internal	Rp. 910,484,000	Rp. 910,484,000
051. Gedung dan Bangunan		
A. <i>Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</i>	Rp. 910,484,000	Rp. 910,484,000
Output 5251.994 Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 50,752,000	Rp. 399,658,000
Layanan Manajemen SDM	Rp. 50,752,000	Rp. 50,752,000
051. Pengelolaan kepegawaian		
Sub Komponen :		
A. <i>Pengelolaan kepegawaian</i>	Rp. 17,024,000	Rp. 50,448,000
B. <i>Sosialisasi Bidang Kepegawaian</i>	Rp. 33,728,000	Rp. 304,000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 172,240,000	Rp. 172,240,000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 52,272,000	Rp. 52,272,000
051. Penyusunan Rencana Program	Rp. 26,136,000	Rp. 366,000
052. Penyusunan Rencana Anggaran	Rp. 26,136,000	Rp. 51,906,000



Output 5251.951:			
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp.	24,636,000	Rp. 24,636,000
051. Evaluasi dan Pelaporan BHP	Rp.	24,636,000	Rp. 24,636,000
Layanan Manajemen Keuangan	Rp.	95,332,000	Rp. 95,332,000
051. Pelaksanaan Anggaran	Rp.	50,772,000	Rp. 53,564,000
052. Akuntansi dan Pelaporan	Rp.	26,436,000	Rp. 23,993,000
053. Perbendaharaan	Rp.	18,124,000	Rp. 17,775,000

B. PERJANJIAN KINERJA

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar telah membuat suatu penetapan kinerja pada awal Januari 2022.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan



Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- Intensifikasi pencegahan korupsi
- Peningkatan kualitas pelayanan public
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR
DENGAN
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.000.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 1.000.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.335.699.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.335.699.000,-

Jumlah Anggaran

Program Administrasi Hukum Umum : Rp. 6,335,699,000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Satuan Kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang secara teknis terkait langsung dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor BHP Makassar yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome :

Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2020 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2020 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome.



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM RI
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Unit Kerja : Balai Harta Peninggalan Makassar
Program : Administrasi Hukum Umum
Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan dan Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%	98.63 %
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	100 %

a. Realisasi dan Capain Kinerja 2021

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capain
1	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	84%	98.63 %	117
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	100 %	111



b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan tahun sebelumnya;

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	82	84	100	98.63	121	117%
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90	90	100	100	111	111



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM RI
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Unit Kerja : Balai Harta Peninggalan Makassar
Program : Administrasi Hukum Umum
Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	84	98.63	117

Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

Kegiatan layanan Balai Harta Peninggalan Makassar mencakup seluruh kegiatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara Tehnis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan teknis pada Tahun 2022 dinilai cukup baik, dengan dilaksanakannya tahapan tugas fungsi teknis.

Kegiatan ini didasarkan pada banyaknya Penetapan/Putusan/Kutipan yang dikirimkan ke Balai Harta Peninggalan Makassar dan menjadi syarat dalam pengurusan tiap Fungsi kepada masyarakat. Instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Badan Pertanahan Nasional, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun pelaksanaan Tugas Fungsi yang dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Makassar yaitu pengurusan Pendaftaran Wasiat Umum/Pembukaan Wasiat Tertutup, Perwalian (selaku Wali Pengawas), Pengampunan (selaku Wali Pengawas),



Onbeheerde, Pailit, Afwezigheid, dan Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Timur Asing. Sedangkan untuk 2 (dua) Tusi tambahan yang sudah memiliki dasar kuat melibatkan Balai Harta Peninggalan selaku pengelolanya, yaitu selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan/tidak diketahui dan selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat, sudah ada yang dilakukan namun belum sempurna dalam proses pendataan, karena masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan dan tindak lanjut dari lembaga terkait.

Perhitungan target kinerja yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini berbeda-beda sesuai dengan sub kegiatan yang dilaksanakan. Namun, dapat dipastikan bahwa target perencanaan didasarkan pada RKAKL-DIPA awal tahun 2022, sedangkan realisasi dilihat dari banyaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan capaian didapatkan dari rata-rata capaian yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Hukum tersebut. Berikut ini akan disajikan data pelaksanaan pada masing-masing kegiatan, diantaranya:

Tabel Layanan Balai Harta Peninggalan Makassar

No	Kegiatan	Pemohon	Realisasi		Ket
			Selesai	Proses	
1	Perwalian	79	79	-	1. Darwis Dg Nai 2. Andi Rosdiana 3. I Gusti Ketut Wilasa 4. Desak Ketut Agung Setia Ningsi 5. A.A Sari Dewi Utami 6. Manik Suhartini 7. Ni Komang Astiyani 8. (anak agung Putu adi tirtawati) 9. RA. Dian Putu Adi Wiastuti 10. Ir. Made Age Gde Putrawan 11. Chandra Ekawati 12. I Nyoman Widari 13. Yudi B Sirari 14. Wa luri Binti La Ago 15. Inel Salim Alhadar Binti Salim Alhadar 16. Udin Kuka S.pd 17. Jumriah Spd 18. Faisal H.S



					76. An. Sukmawati 77. An. Nur Indah Purnamaasari 78. An. Kame 79. An. Nur Adriyanti
2	Pengampuan	2	2		1. An. Kasma** 2. An. Abidah
3	Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat Tertutup	9	9	-	1. An. Budi Santoso 2. An. Alan Charles Oken 3. An. Sunarti Sukri 4. An. Lina 5. An. Marcelle Ivone Annete N 6. An. Ni Nyoman Nohana Arlinawati 7. An. Walter Maria J Eggertmont 8. An Roger Markus 9. An. Alm Frans Peter
4	Harta Tak Hadir				
	a. Transfer Dana				
	b. Jaminan Hari Tua				
5	Harta Tak Terurus				
6	Kepailitan	4	-	4	1. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 05/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mks (Tn Heru Sugianto & Ny Ledy Sitjol) 2. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 02/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks (PT.Pratama Golden Jaya) 3. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 04/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks (PT.Travel Expres Aviation) 4. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 01/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Mks (Tn. Wira Jiameshia dan Ny Silvia)
7	Surat Keterangan Hak Waris	7	7	-	1. Tuan Tjoeng Naidy Tanasal 2. Ravinder Singh Sodhi 3. Hj. Halimah binti sikati 4. Drg Hj Halimah 5. An. Hoy ryanto alias Hoiryanto 6. An. Fetrani Kumala 7. An. Arif bin Abd Karim Suratie
Total		99	95	4	



No	Layanan	JML Permohonan	Realisasi		Keterangan
			Selesai	Proses	
1	Layanan Perwalian dan Pengampuan				
a	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali	57	57		Jan - Des 2022
b	Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	70	70		Jan - Des 2022
c	Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan				
d	Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta persekutuan, Harta Kekayaan	70	70		Jan - Des 2022
e	Layanan Pengampu Anak yang Masih Dalam Kandungan				
f	Layanan Pengurus atas Diri Pribadi dan Harta Kekayaan Anak-Anak Masih Belum Dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali				
g	Layanan Mewakili Kepentingan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Adanya Pertentangan dengan Kepentingan Wali				
h	Layanan Mengurus Harta Kekayaan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Pengurusan itu Dicabut oleh wali mereka				
e	Layanan Pengampuan	2	2		Jan - Des 2022
2	Layanan Pendaftaran Surat Wasiat dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW)				
a	Pendaftaran Akta Wasiat	8	8		Jan - Des 2022
b	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	7	7		Jan - Des 2022
c	Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia				
d	Salinan Surat Berita Acara Penghadapan	76	76		Jan - Des 2022



3	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid)	-		-	
4	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nalateschap)				
5	Layanan Kepailitan	4	-	4	1. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 05/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mks (Tn Heru Sugianto & Ny Ledy Sitjol) 2. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 02/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks (PT.Pratama Golden Jaya) 3. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 04/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks (PT.Travel Expres Aviation) 4. Putusan PN Niaga Mks Nomor : 01/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Mks (Tn. Wira Jiameshia dan Ny Silvia)
6	Layanan BPJS Tenaga Kerja				
7	Penerimaan Transfer Dana dari Bank				
Total		294	290	4	
Realisasi		98.63 %			

Kegiatan pelayanan hukum pada Balai Harta Peninggalan Makassar terdiri dari Pembukuan dan pendaftaran Wasiat, Perwalian, pengampuan, Harta Tak Terurus (Onbeheerde Nalateschap), Harta Tak Hadir (Afwezigheid) termasuk Dana dan jaminan Hari Tua karena substansinya sama dengan Ketidakhadiran, Kepailitan, Surat keterangan Hak Waris (SKHW). Pelayanan hukum tersebut dilaporkan setiap bulan



dalam laporan bulanan kegiatan teknis dan Seksi harta peninggalan. Kegiatan pelayanan hukum yang dilakukan juga menghasilkan Penerimaan Negara bukan Pajak yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

Pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019

Jenis PNBP	Satuan	Tarif
II. Harta Peninggalan		Rp 100.000,00
1. Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara Online	per akta	
2. Pemberian Surat Keterangan Wasiat	Persurat Keterangan	Rp 500.000,00
3. Pemberian Surat keterangan wasiat yang hilang atau rusak	Persalinan	Rp 500.000,00
4. Informasi Data Wasiat secara online	Perdokumen	Rp 250.000,00
5. Permohonan tanda terdaftar sebagai Kurator dan pengurus	Per Orang 5 Tahun	Rp 5.000.000,00
6. Persetujuan perpanjangan sebagai curator dan pengurus	Per Orang 5 Tahun	Rp 10 000.000,00
7. Penerbitan surat perpanjangan sementara sebagai curator dan pengurus	Per Orang	Rp 1.000.000,00
8. Pemberian Salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan pengurus	Per Orang	Rp 5.000.000,00
9. Pencarian /Unduh/Search/download data curator secara online	Per pencarian	Rp 50.000,00
10. Pemberian Acara dan Salinan Surat		
a. Berita Acara penyempahan		
1. Penyempahan Wali tdk ada Harta	Per Berita Acara	0
2. Penyempahan Wali Ada Harta	Per Berita Acara	Rp 100.000,00
3. Penyempahan Pengampuan	Per Berita Acara	Rp 200.000,00
b. Pembuatan berita Acara kehamilan		
c. Salinan Surat		



1. Berita Acara penghadapan	Per Berita Acara	Rp 20.000,00
2. Berita Acara pencatatan Harta Peninggalan/Pesekutuan, Harta kekayaan	Per Berita Acara	Rp 20.000,00
3. Berita acara pembuatan penyempahan	Per Berita Acara	Rp 20.000,00
4. Surat keterangan Hak Waris	Per Surat keterangan	Rp 20.000,00
5. Keterangan persetujuan wali/pengampu untuk menjual harta	Per Surat keterangan	Rp 100.000,00
6. Berita Acara kehamilan	Per Berita Acara	Rp 20.000,00
11. Pendaftaran Akta Wasiat	Per Akta	Rp 200.000,00
12. Berita Acara pembukaan dan pembacaan Wasiat	Per wasiat	Rp 500.000,00
13. Pembuatan Surat keterangan Hak Waris	Per Surat	Rp 200.000,00
14. Surat ket persetujuan kepada wali/pengampu untuk menjual harta kekayaan	Per Surat	Rp 200.000,00
15. Penjualan dan penyelesaian harta kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus dan kepailitan		
a. Harta tetap	Per budel	2,5% dari penjualan
b. Harta Bergerak		
1. BHP selaku Pelaksana Wali sementara harta tak terurus	Per budel	3,5% dari seluruh harta peninggalan
2. Ketidakhadiran		
3. Balai harta selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan ketidakhadiran dan harta tdk terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	Per budel	3,75 % dari jumlah harta peninggalan dan 1,5% dari jumlah hutang peninggalan
4. Balai harta selaku wali pengawas	Per budel	2% dari jumlah kekayaan
5. Dalam hal balai harta peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya		



Matriks Pelayanan

No	Sub Direktorat	Jenis Layanan	Jumlah Transaksi (Rp)	Jumlah PNPB	Keterangan
1	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN Sgm (An.Darwis Dg Nai)
2	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	3	Rp. 480.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor : - 130/Pdt.P/2021/PA Tte (An. Udin Kuka) - 155/Pdt.P/2021/PA Tte (An. Wa Luri) - 155/Pdt.P/2021/PA Tte (An. Inel Salim)
3	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Bau – Bau Nomor :37/Pdt.P/2021/PN Bau (An. Fariani)
4	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 40.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Bau – Bau Nomor; 36/Pdt.P/2021/PA Bau (An.Munanti)
5	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	3	Rp. 480.000	Nomor: - 255/Pdt.P/2021/PA Pk (An Aryati Rauf) - 168/Pdt.P/2021/PA Pk (Faisal HS) - 210/Pdt.P/2021/PA Pk (An.Jumriah)
6	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: No.459/Pdt.P/2021/PA.SKG
7	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: No.24/Pdt.P/2021/PN. Mam
8	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	7	Rp. 1.120.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1. 66/Pdt.P/2022/PN. Dps 2. 671/Pdt.P/2021/PN. Dps



					3. 464/Pdt.P/2021/PN. Dps 4. 68/Pdt.P/2022/PN. Dps 5. 687/Pdt.P/2021/PN.Dps 6. 739/Pdt.P/2021/PN.Dps 7. 42/Pdt.P/2022/PN.Dps
9	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 100.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 705/Pdt.P/2021/PN. Dps
10	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 40.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 23/Pdt.P/2022/PN.Dps
11	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 60.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 714/Pdt.P/2021/PN. Dps
12	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	2	Rp. 120.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 1. 76/Pdt.P/2021/PN. Gin 2. 120/Pdt.P/2021/PN. Gin
13	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	1	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 94/Pdt.P/2021/PN. Gin
14	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Surat Keterangan Hak Waris	1	Rp. 200.000	Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : W.23.AHU.AHU.2.AH.06.09- 147 yang di terbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar, tanggal 29 Maret 2022.
15	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	26/Pdt.PI2021IPA.Wp a.n. Ariyana Ratma Lasari
16	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Kendari 5/Pdt.Pt2022tPA.Kdi a.n. Nurhayati
17	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Kendari 41/Pd PI2022IPA.Kdi a.n. Lisnawati



18	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Kendari 43/Pdt.Pt2022tPA.Kdi a.n. Naldy Hidayat
19	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Kendari 56/Pdt.Pt2022tPA.Kdi a-n- Gami
20	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Kendari 59/Pdt.P/2022ZPA.Kdi a.n. Leilana
21	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	Penyempahan Wali Penetapan Pengadilan Agama Kendari 77/Pdt.PI2022tPA.Kdi a.n. Anna Nur Anna
22	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali tidak ada harta	0	Rp. 0	2/Pdt.P/2022/PA Pkj a.n. Marwati Rasyid
23	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali tidak ada harta	3	Rp. 140.000	22/Pdt.P/2022/PA Tkl An. Alimuddin
24	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali ada harta	3	Rp. 140.000	27/Pdr.P/2022/PA Tkl a.n. Hawatia
25	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali ada harta	4	Rp. 160.000	39/Pdt.P/2022/PA Sgm a.n. Andriani Saptawati
26	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali ada harta	4	Rp. 160.000	67/Pdt.P/2022/PA Sgm a.n. Sittiati Dg Kanang
27	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali ada harta	4	Rp. 160.000	16/Pdt.P/2022/PA Sgm a.n Muhammad Andi T
28	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyempahan Wali tdk ada harta	2	Rp. 40.000	78/Pdt.P/2022/PA.Kdi a.n. Nurhati
29	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	3	Rp. 240.000	Dilaksanakan pada Bulan April-Mei 2022.



30	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 440.000	Dilaksanakan pada Bulan Mei-Juni 2022
31	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Pengampu	4	Rp. 260.000	32IPdt.P/2022IPN.Sgm a.n. Kasma
32	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	SKHW	2	Rp. 400.000	1. An. Hoy ryanto alias Hoiryanto 2. An. Fetrani Kumala
33	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	WASIAT	3	Rp. 900.000	Pendaftaran Akta Wasiat 1. An. Budi Santoso 2. An. Alan Charles Oken Pembukaan Wasiat Tertutup; 1. An. Walter Maria J Eggertmont
34	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	9	Rp. 260.000	Dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022
35	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Wasiat	1	Rp. 200.000	An. Sunarti Sukri (Pendaftaran Akta Wasiat)
36	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Pendaftaram Wasiat Umum	1	Rp. 200.000	An. Erwin Rizal Tunardy
37	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyumpahan Wali tidakada harta	3	Rp. 60.000	157/Pdt.P/2021/PN.Mks a.n. Susanna
38	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyumpahan Wali tidakada harta	3	Rp. 60.000	5/Pdt.P/2022/PN.Mks a.n. Indaryati Fudhail
39	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Penyumpahan Wali tidakada harta	3	Rp. 480.000	Dilaksanakan pada Bulan September 2022
40	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Pengampuan	1	Rp. 260.000	Dilaksanakan pada Bulan September 2022



41	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Pendaftaran Wasiat	1	Rp. 200.000	Dilaksanakan pada Bulan September 2022
42	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	99/Pdt.P/2022/PA.Tkl a.n. Nasrullah
43	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	365/Pdt.P/2022/PA Wtp a.n Nur Afni
44	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	3	Rp. 60.000	589/Pdt.P/2022/PA Wtp a.n. Kamsidar
45	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	. 224/Pdt P/2022/PA.Sgm a.n. Sitti Rainawati
46	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Wasiat	1	Rp. 200.000	An. Alm Roger Markus
47	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Wasiat	1	Rp. 200.000	An. Alm Franz Peter
48	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	a.n. Jamaluddin Beta
49	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	a.n Ibrahim Yusuf Binti Yusuf
50	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	SKHW	3	Rp. 240.000	a.n. Arif Bin Abd Karim Suratie
51	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	2	Rp. 40.000	. An. Laila Dero
52	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	3	Rp. 60.000	An. Astuti



53	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	An. Yuliana Alnur
54	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	An. We Mardani
55	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	An. Kartini
56	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	2	Rp. 40.000	An. Sukmawati Binti Sembang Buang
57	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	An. Nur Indah Purnamaasari
58	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	3	Rp. 60.000	An. Kame
59	Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU	Perwalian	4	Rp. 160.000	An. Nur Adriyanti



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM RI
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Unit Kerja : Balai Harta Peninggalan Makassar
Program : Administrasi Hukum Umum
Indikator Kinerja : Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah dang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	100 %	111

Pesentase Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

Realisasi Kegiatan Layanan Adminstratif dan Fasilitatif dilihat dari banyaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan capaian didapatkan dari rata-rata capaian yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan pada Kegiatan Layanan Adminstratif dan Fasilitatif layanan Administrasi Hukum Umum tersebut. Berikut ini akan disajikan data pelaksanaan pada masing-masing kegiatan, diantaranya Penyelenggaraan Perencanaan, Laporan Keuangan, Citra Positif pada Balai Harta Peninggalan Makasar Tahun 2022 :

No	Komponen Dukman	Satuan	Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase (%)
1	Perencanaan Anggaran	Dokumen	2	2	100
2	Laporan keuangan	Dokumen	2	2	100
3	Pencitraan Positif	Berita	2	2	100
TOTAL					300
Realisasi					100



a. Perencanaan Anggaran

- Pagu Anggaran 2023 (***RKA terlampir***)
- Rincian Kertas Kerja Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 (***terlampir***)

b. Laporan keuangan

- Laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2022. Realisasi Pendapatan dan Hibah pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 15. 680.000,-** (*lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah rupiah*) atau mencapai 0.00% (Nol Persen) dari estimasi Pendapatan dan Hibah-LRA sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp. 5,915,596,315,-** (*lima miliar sembilan ratus lima belas juta limas ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah*) atau mencapai 93.37 % (*sembial Puluh tiga Koma lima belas Persen*) dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 6,335,699,000** (*enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah rupiah*).

c. Pencitraan Positif

Data pemberitaan positif pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui Media cetak, Media Elektronik maupun Media Online Januari s.d Desember Tahun 2022 antara lain :



No	Tanggal	Media ,Link Dan Judul	Dokumentasi
1	Selasa, 22 Februari 2022 17:41	Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Balai Harta Peninggalan Kemenkumham Makassar Bisa Jadi Kurator Kepailitan, Diakui Undang-undang, https://makassar.tribunnews.com/2022/02/22/balai-harta-peninggalan-kemenkumham-makassar-bisa-jadi-kurator-kepailitan-diakui-undang-undang	
2	Rabu, 23 Februari 2022 - 22:27 WIB	Artikel ini telah tayang di makassar.sindonews.com dengan judul Balai Harta Peninggalan Makassar Layani Kepailitan di 13 Provinsi https://makassar.sindonews.com/read/694889/710/balai-harta-peninggalan-makassar-layani-kepailitan-di-13-provinsi-1645628567	
3	Kamis, 31 Maret 2022 10:39.	Artikel ini telah tayang di Error! Hyperlink reference not valid. dengan judul Kakanwil Kemenkumham Sulsel Lantik Kepala BHP Makassar, https://makassar.tribunnews.com/2022/03/31/kakanwil-kemenkumham-sulsel-lantik-kepala-bhp-makassar . Penulis: Hutami Nur Saputri Editor: Sukmawati Ibrahim	



4	Kamis, 31 Maret 2022 - 14:50 WIB	<p>Lantik Pejabat BHP Makassar, Kakanwil Kemenkumham Minta Perkuat Sinergi</p> <p>Tim SINDOnews</p> <p>https://makassar.sindonews.com/read/729355/710/lantik-pejabat-bhp-makassar-kakanwil-kemenkumham-minta-perkuat-sinergi-1648710220</p>	
---	---	--	--

Koordinasi

Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas BHP pada Kantor BHP Makassar Tahun 2022 mencakup

a. Koordinasi dengan Instansi Pusat

kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI :

NO	TGL PELAKSANAAN	TUJUAN	JUMLAH	KEGIATAN
1	29 Nov - 1 des	Ditjen AHU	3 Org	Inventarisasi bongkarang renovasi BMN berupa gedung dan bangunan
2	29 Nov - 1 des	Ditjen AHU	3 Org	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga
3	29 Nov - 1 des	Setjen	3 Org	Perubahan jabatan dan kelas jabatan dan mutasi

b. Kordinasi dengan Intasin terkait

kegiatan Koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Terkait guna Penyamaan Persepsi dan tindak lanjut dengan Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan di wilayah kerja BHP Makassar :



No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tgl Kegiatan	Peserta	Maksud dan Tujuan
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Negeri Bantaeng	Kab. Bantaeng pada tanggal 15 Juli s.d. 16 Juli 2022;	4 Org	Melaksanakan koordinasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Negeri Bantaeng
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Negeri Jeneponto	Kab. Jenponto pada tanggal 15 Juli s.d. 16 Juli 2022	4 Org	Melaksanakan koordinasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Negeri Jeneponto
3	Melakukan koordinasi mengenai Tata Kelola Arsip pada Balai Harta Peninggalan Jakarta	Balai Harta Peninggalan Jakarta pada tanggal 22 Juli;	2 Orang	Melaksanakan koordinasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di BHP Jakarta
4	koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;	di Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 14 September s.d. 16 September 2022	4 org	Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Agama Sorong
5	koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;	di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 September s.d. 16 September 2022;	4 org	Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB



6	koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;	Ditjen AHU tanggal 1 September s.d. 3 September 2022	2 org	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mengenai Pemberesan Uang Pihak Ketiga yang telah jatuh tempo pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
---	---	--	-------	---



Matriks Kegiatan Perjalanan Dinas

No	Jenis dan Nama Kegiatan	Tanggal dan Tempat Kegiatan	Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Manfaat dan Impact
1	Melakukan tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 49/Pdt.PI2021IPN Sgm, Dalam rangka pengawasan Perwalian	04 Januari 2022 Di Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.	1. Abd. Talib 2. AndiMalika 3. Khandita Wijaya	Melakukan pengawasan terhadap Wali berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa Provinsi Sulawesi Selatan	Menemui Keluarga Wali Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN sgm	Balai Harta Peninggalan Makassar dapat menjalankan tugasnya selaku wali pengawas sebagai tindak lanjut dari penetapan Perwalian yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa
2	Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN.Gin, Nomor: 94/Pdt.P/2021/PN.Gin, Nomor : Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN.Gin, Nomor: 145/Pdt.P/2021/ PN. Gin yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar kepada Balai Harta Peninggalan Makassar dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris atas nama Ravinder Singh Sodhi alias Ravinder Singh dari Almarhumah Madhu Sodhi.	30 s.d. 2 Maret 2022, Kab. Gianyar	Jumlah Pegawai 3 (tiga) Orang	Melaksanakan Tindak lanjut Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN.Gin, Nomor: 94/Pdt.P/2021/PN.Gin, Nomor : Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN.Gin, Nomor: 145/Pdt.P/2021/ PN. Gin yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar kepada Balai Harta Peninggalan Makassar dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris atas nama	Telah melaksanakan Penyempahan dan Pencatatan Harta Perwalian Anak di Bawah Umur ; 2.Telah diterbitkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : W.23.AHU.AHU.2.AH.06.09- 147/2022	Terlindunginya aset anak di bawah umur dan aset di dalam SKHW telah terdaftar di BHP Makassar



				Ravinder Singh Sodhi alias Ravinder Singh dari Almarhumah Madhu Sodhi.		
3	Tindak lanjut penetapan perwalian Pengadilan agama di kabupaten wajo (sengkang) NO.459/Pdt.P/2021/PA.SKG	1 s.d. 3 Maret 2022, Kabupaten Wajo	Jumlah 5 (lima) pegawai	Melaksanakan tindak lanjut Penetapan No. NO.459/Pdt.P/2021/P A.SKG	Telah dilakukan Penghadapan, Pencatatan Harta dan Penyempahan Wali ada harta ANDI ROSDIANA binti ANDI ABDUL FATTAH, sebagai Wali atas ANDI SABRINA ANNINA binti ANDI EFENDI. S (umur 14 tahun) dan ANDI AZZAH ZAHRAA binti ANDI EFENDI. S (umur 12 tahun)	Terlindunginya Aset anak di bawah Umur yang telah terdaftar di BHP Makassar
4	Tindak lanjut penetapan perwalian Pengadilan Negeri Denpasar di Kota Denpasar Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN. DPS, Nomor: 66/Pdt.P/2022/PN.DPS, Nomor : 714/Pdt.P/2021/ PN. Dps, Nomor: 705/Pdt.P/2021/ PN. Dps, Nomor: 671/Pdt.P/2021/PN. Dps, Nomor: 464/Pdt.P/2021/ PN. Dps.	9 s.d. 12 Maret 2022, Kota Denpasar	Jumlah Pegawai 3 (tiga) orang	Melaksanakan tindak lanjut penetapan Nomor : Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN. DPS, Nomor: 66/Pdt.P/2022/PN.D PS, Nomor : 714/Pdt.P/2021/ PN. Dps, Nomor: 705/Pdt.P/2021/ PN. Dps, Nomor: 671/Pdt.P/2021/PN. Dps, Nomor: 464/Pdt.P/2021/ PN. Dps.	Telah dilaksanakan penyempahan dan pencatatan harta anak di bawah umur	Terlindunginya Aset anak di bawah Umur yang telah terdaftar di BHP Makassar
5	Dalam rangka pengawasan Perwalian	16-19 Maret 2022 Kota ternate-Maluku Utara	1. Hasis M 2. AndiMalika 3. Nurul Afiah	Menindaklanjuti penetapan pengadilan Agama Ternate dalam rangka pengawasan perwalian	Menindaklanjuti 3 (tiga) Penetapan perwalian	Perlindungan Anak dibawah umur



6	Melaksanakan pembukaan Safe Deposit Box pada Bank Mandiri Batam, Nomor: 8088 atas nama Almarhumah Sudi Ani atas harta peninggalannya telah terdaftar pada Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan Nomor : W.23.AHU.AHU.2-AH.06.02-60, tanggal 16 Maret 2021, sesuai dengan ketentuan pada Pasal Pasal 386 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.	22 s.d. 24 Maret 2022, Kota Batam	Jumlah Pegawai 3 (tiga) Orang	Melaksanakan Pembukaan SDB Nomor: 8088 Bank Mandiri Kantor Cabang Batam Jalan Imam Bonjol	Telah melaksanakan Pembukaan dan Pencatatan aset anak di bawah umur terkait SDB Nomor: 8088 Bank Mandiri Kantor Cabang Batam Jalan Imam Bonjol	Terlindunginya Aset anak di bawah Umur yang telah terdaftar di BHP Makassar
7	Dalam rangka pengawasan Perwalian	23 Maret 2022 Kab.Pangkajene - Sulawesi Selatan	1. Abd. Talib 2. Hadariah 3. A.Ilham 4. Fahmi Ruji	Menindaklanjuti penetapan pengadilan Agama Pangkajene dalam rangka pengawasan perwalian	Menindaklanjuti 2 (dua) Penetapan perwalian	Perlindungan terhadap Anak dibawah umur
8	Dalam rangka pengawasan Perwalian	23 -25 Maret 2022 Bau – Bau	1. Hasis M 2. AndiMalika 3. Irmasari	Menindaklanjuti penetapan pengadilan Agama Pangkajene dalam rangka pengawasan perwalian	Menindaklanjuti 3 (tiga) Penetapan perwalian	Perlindungan terhadap Anak dibawah umur
9	Melakukan tindak lanjut penetapan Pengadilan Agama watanpone Nomor: 26tPdt.P12021IPA.Wtp , Dalam rangka pengawasan Perwalian	13 – 14 April Kab. Bone	1. Abd. Talib 2. Nurul Afiah 3. Fahmi Ruji	Menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Agama ternate dalam rangka pörwalian pengawas	Tindaklanjut 1 (satu) penetapan perwalian	Perlindungan terhadap harta anak di bawah umur



10		27 – 28 April 2022 dan dilaksanakan Kabupaten Bantaeng – Provinsi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sofyan Arfah, S.H. 2. Santy Kiay, S.H.,M.H 3. Andi Azwad Anshari Razak, S.H. 4. 4. Asriani Adam 	Tindak Lanjut Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Bantaeng.	Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat, Pencatatan Harta Peninggalan dan Penyumpahan atas Wali Nursiah Dg. Simba, S.Pd; Memungut PNBP sebesar Rp160.000,00.	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan masalah Perwalian dan melindungi harta anak yang telah dicatat sekaligus mengawasi Wali dalam menjalankan tugasnya sehingga hak-hak anak di bawah umur tidak dirugikan.
11	Melakukan tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: - 5tPdt.Pt2022tPA.Kdi - 41tPdt.Pt2022IPA.Kdi - 43tPdt.Pt2022tPA.Kdi - 56tPdt.Pt2022tPA.Kdi - 59/Pdt.P/2022IPA.Kdi - 77 tPdt.Pt2022tPA.Kdi Dalam rangka pengawasan Perwalian	Kendari tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadariah 2. Malika 3. Irma Sari 4. hardianti 	Menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene dalam rangka perwalian pengawas	indaklanjuti 6 (enam) penetapan perwalian	Perlindungan terhadap harta ahli waris
12	Perjalanan Dinas dalam rangka perwalian pengawas	12-13 Mei 2022, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan	Efraim Tana, Irma Sari dan Dian Vianny Bere	Menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene dalam rangka perwalian pengawas	Tindaklanjuti 1 (satu) penetapan perwalian	Perlindungan terhadap harta anak di bawah umur
13		18 Mei 2022 dan dilaksanakan Kabupaten Maros – Provinsi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efraim Tana, S.E.,S.H., M.H. 2. Hadariah, S.E.,M.H. 3. Irma Sari, S.E.,M.H. 	Tindak Lanjut Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Maros.	Penghadapan, Pencatatan Harta (wali tidak ada harta) dan Penyumpahan Wali atas nama Hj. Rahmawati binti Hayya dan Diah Budi Indah Suryandari; Memungut PNBP sebesar Rp80.000,00.	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan masalah Perwalian dan melindungi harta anak yang telah dicatat sekaligus mengawasi Wali



			4. Nurul Afiah Idrus, S.H. 5. Raoda			
14	Perjalanan Dinas dalam rangka perwalian pengawas	18 Mei 2022, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	Abd Talib, Asriani Adam, Dian Vianny Bere, Siti Nurul Ajizah dan Sanintya Mayantya	Menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam rangka perwalian pengawas	Tindaklanjut 2 (dua) penetapan perwalian	Perlindungan terhadap harta anak di bawah umur
15	Perjalanan Dinas dalam rangka perwalian pengawas	18-19 Mei 2022, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	Hasis Marollah, Muhammad Ibnu Qayyim dan Haris Maulana Rahim	Menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Agama Takalar dalam rangka perwalian pengawas	Tindaklanjut 2 (dua) penetapan perwalian	Perlindungan terhadap harta anak di bawah umur
16	Perjalanan Dinas dalam rangka perwalian pengawas	19 Mei 2022, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	Hadariah, Irma Sari, Muh. Erwin, Nurul Afiah Idrus dan Ahmad Riza	Menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam rangka perwalian pengawas	Tindaklanjut 2 (dua) penetapan perwalian	Perlindungan terhadap harta anak di bawah umur
17	Perwalian	30 Mei – 1 Juni 2022 & Kota Manado – Provinsi Sulawesi Utara	1. Dr. Efraim Tana, S.E.,S.H.,M.H. 2. Santy Kiay, S.H.,M.H. 3. Irma Sari, S.E.,M.H. 4. Abram D. L. Sitepu, S.H.	Tindak Lanjut Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri Kelas IA Manado	1. Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat, Pencatatan Harta Peninggalan dan Penyempahan atas Wali Tersje Janjse Mokalau; Memungut PNBPN sebesar Rp160.000,00. 2. Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat dan Penyempahan atas Santje Esther Besty Jetty Palad (wali tidak ada harta); Memungut	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan masalah Perwalian dan melindungi harta anak yang telah dicatat sekaligus mengawasi Wali dalam menjalankan tugasnya sehingga hak-hak anak di bawah umur tidak dirugikan.



					<p>PNBP sebesar Rp60.000,00.</p> <p>3. Tim mendatangi Kelurahan Kiragi Dua, dimana wali Novi Anita tercatat tetapi yang bersangkutan diketahui telah pindah ke Timika – Papua.</p> <p>4. Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat dan Penyempahan atas Victoria Wealthy (wali tidak ada harta), tetapi yang bersangkutan menolak mengambil Salinan berita acara.</p> <p>5. Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat, Pencatatan Harta Peninggalan dan Penyempahan atas Nirah Idrus; Memungut PNBP sebesar Rp160.000,00.</p> <p>6. Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat dan Penyempahan atas Novita Nontje Poluan (wali tidak ada harta); Memungut PNBP sebesar Rp60.000,00.</p>	
18	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait masalah kepegawaian dan Kearsipan di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI	tanggal 21 Juli s.d. 23 Juli 2022; Sekjen Kemenkumha	1. Andi Ilham Yusran, S.E. 2. Muhammad Fahmi Ruji, S.H.	konsultasi terkait masalah kepegawaian dan Kearsipan	Memahami dan permasalahan permasalahan terkait kepegawaian dan kearsipan kepegawaian	Agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dan tata cara penyusunan kearsipan



		m RI di JAKARTA	3. Dian Vianny Bere, S.H. 4. Ahmad Rizal, S.H.			
19	Melaksanakan koordinasi tentang masalah Keuangan (anggaran Appraisal, revisi anggaran Tahun 2022 dan perencanaan anggaran Tahun 2023) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	21 Juli s.d. 23 Juli 2022. AHU Jakarta	1. Mulyadi Arfah 2. Siti Nurul Ajizah 3. Sanintya Mayantya	konsultasi terkait masalah masalah Keuangan (anggaran Appraisal, revisi anggaran Tahun 2022 dan perencanaan anggaran Tahun 2023) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum		
20	Tindak Lanjut Penetapan Pengampunan	02 – 5 Agustus 2022 & Kota Manado – Provinsi Sulawesi Utara	1. Sofyan Arfah 2. Ibnu Qayyim 3. Andi Malika 4. Irma Sari	Melakukan Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Provinsi Maluku Nomor : 12/Pdt.P/2022?PN. Amb, 42/Pdt.P/2022/PN.A mb dan 77/Pdt.P/2022/PN.A mb terkait . Pada tanggal 2 Agustus s.d 5 agustus 2022 di Ambon Provinsi Maluku.	Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat, Pencatatan Harta Peninggalan dan Penyempahan	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan masalah Perwalian dan melindungi harta anak yang telah dicatat sekaligus mengawasi Wali dalam menjalankan tugasnya sehingga hak-hak anak di bawah umur tidak dirugikan
21	Tindak Lanjut Penetapan perwalian	02 – 5 Agustus 2022 & Kota Manado – Provinsi Sulawesi Utara	1. Mulyadi Aarfah 2. Dr. Efraim Tana, S.E.,S.H., M.H.	Melakukan Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Provinsi Maluku Nomor : 49/Pdt.P/2022?PN.	Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat, Pencatatan Harta Peninggalan dan Penyempahan	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan masalah Perwalian dan melindungi harta anak yang telah dicatat



			3. Nurul Afiah, S.H.	Amb, 3/Pdt.P/2022/PN.Amb dan 6/Pdt.P/2022/PN.Amb		sekaligus mengawasi Wali dalam menjalankan tugasnya sehingga hak-hak anak di bawah umur tidak dirugikan
22	Tindak Lanjut Penetapan perwalian	08 – 11 Agustus 2022 & Kota Manado – Provinsi Sulawesi Utara	1. Abd. Thalib 2. Hasis Marollah Ibnu Qayyim	Melakukan Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo terkait pengawasan wali atas anak di bawah perwalian di Gorontalo Provinsi Gorontalo.	Memberikan penjelasan Perwalian, Pemeriksaan Setempat, Pencatatan Harta Peninggalan dan Penyempahan	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan masalah Perwalian dan melindungi harta anak yang telah dicatat sekaligus mengawasi Wali dalam menjalankan tugasnya sehingga hak-hak anak di bawah umur tidak dirugikan
23	Melaksanakan penelusuran asset pailit	24 – 26 Agustus 2022 di Kementerian Perhubungan di Jakarta	1. Mulyadi Arfah 2. Sofyan Arfah Andi Azwad	Melaksanakan penelusuran asset pailit terkait Informasi Data Kepemilikan Pesawat PT. Travel Express Aviation Services (dalam pailit) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	penelusuran asset pailit terkait Informasi Data Kepemilikan Pesawat PT. Travel Express Aviation Services (dalam pailit)	Melaksanakan salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu pengurusan Kepailitan
24	Perjalanan Dinas dalam rangka sidang pemeriksaan bukti oleh Penggugat	8 September 2022, Pengadilan Negeri Makassar	5. Abd Talib 6. Sofyan Arfah 7. Andi Malika 8. Irma Sari 9. Andi Azwad Nurul Afiah Idrus	Sidang melawan gugatan Kementerian Perhubungan dalam Pailit PT. Travel Express Aviation Service.	Pemeriksaan bukti oleh Penggugat	Pelaksanaan proses persidangan



25	Perjalanan Dinas dalam rangka sidang pemeriksaan bukti oleh Tergugat	9 September 2022, Pengadilan Negeri Makassar	4. Abd Talib 5. Sofyan Arfah 6. Andi Malika 7. Irma Sari 8. Andi Azwad Nurul Afiah Idrus	Sidang melawan gugatan Kementerian Perhubungan dalam Pailit PT. Travel Express Aviation Service	Pemeriksaan bukti oleh Tergugat	Pelaksanaan proses persidangan
26	Perjalanan Dinas dalam rangka sidang pemeriksaan bukti oleh Penggugat (lanjutan)	19 September 2022, Pengadilan Negeri Makassa	3. Abd Talib 4. Sofyan Arfah 5. Irma Sari 6. Andi Azwad Nurul Afiah Idrus 7. Nurul Afiah Hardianti	Sidang melawan gugatan Kementerian Perhubungan dalam Pailit PT. Travel Express Aviation Service.	Pemeriksaan bukti oleh Penggugat	Pelaksanaan proses persidangan
27	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	24 Oktober 2022 Takalar, Provisini Sulawesi Selatan	Surat Perintah No: W.23.AHU.A HU.1-UM. 03.07- 287 Thn 2022: Abd Talib Abram Levy Sitepu Nurul Afiah Idrus	Tindak lanjut Penetapan Perwalian Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Tkl dan 99/Pdt.P/2022/PA.Tkl	Pemeriksaan setempat , pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur
28	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	24 Oktober 2022 Watampone, Provisini Sulawesi Selatan	Surat Perintah No: W.23.AHU.A HU.1-UM. 03.07-286 Thn 2022: Hadariah Muh. Ibnu Qayyim Irma Sari	Tindak lanjut Penetapan Perwalian No: 365/Pdt.P/2022/PA Wtp dan No. 589/Pdt.P/2022/ PA Wtp	Pemeriksaan setempat, pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur



29	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	25 Oktober 2022 Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Perintah No: W.23.AHU.A HU.1-UM. 03.07-294 Thn 2022: Efraim Tana Nurul Afiah Idrus Haris Maulana Rahim	Tindak lanjut Penetapan Perwalian No 224/Pdt.P/2022/PA. Sgm	Pemeriksaan setempat , pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur
30	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	23 – 25 Oktober 2022 Tangerang, Provinsi Banten	Surat Perintah No: W.23.AHU.A HU.1-UM. 03.07-283 Thn 2022: Mulyadi Arfah Sofyan Arfah Hasis Marollah Andi Azwad Anshari Razak	Penelusuran aset pailit PT Travel Express Aviation Service berupa tanah dan pesawat	Berkoordinasi dengan Diraktur Pengadaan tanah pemerintah mengenai aset tanah PT Travel Express Aviation Service. - Memperoleh informasi langsung dari Keoala Unit Penyelenggara Bandar Udara Curug bahwa keberadaan pesawat milik Debitor telah dijual kepada Trigana Air sekitar Tahun 2019.	Penelusuran harta debitor untuk perlindungan terhadap hak-hak para Kreditor terhadap aset apilit Debitor
31	Layanan Harta Tak Terurus	Tanggal 19-21 Oktober 2022 Denpasar, Provinsi Bali		Melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) Pasal 11261128 KUHPerduta	Pembuatan berita acara pemeriksaan ; 2. Berita Acara Pencatatan Harta ; 3. Pemberitahuan ke Instansi Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan BPK. 4. Pengumuman Koran (Lokal : Denpasar Pos/ Nasional: Sindo).	Terlaksananya tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di Wilayah Kerja pada Provinsi Bali sesuai ketentuan pada Pasal 1126-1128 KUHPerduta.
32	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	2 November - 4 November 2022 Ternate, Provinisi Maluku Utara	Surat Perintah No: W.23.AHU.A HU.1-UM. 03.07- 307 Thn 2022:	Tindak lanjut Penetapan Perwalian No: 141/Pdt.P/2022/PA Tte	Pemeriksaan setempat , pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur



			Hasis Marollah Hadariah Haris Maulana R			
33	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	16 – 17 Nov 2022 di Kab jeneponto	3 Orang	Tindak lanjut Penetapan Pengadilan Agama Jenepoto	Pemeriksaan setempat , pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur
33	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	16 – 17 Nov 2022 di Kab. Sidrap	3 Orang	Tindak lanjut Penetapan Pengadilan Agama Sidrap	Pemeriksaan setempat, pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur
34	Perjalanan Dinas dalam rangka tindak lanjut penetapan perwalian	21 November 2022 Takalar, Provisini Sulawesi Selatan	Surat Perintah No: W.23.AHU.A HU.1-UM. 03.07-328 Thn 2022: Hadariah Andi Ilham Yusran Abram David Levy Sitepu Hardianti	Tindak lanjut Penetapan Perwalian No: 100/Pdt.P/2022/PA. Tkl dan 130/Pdt.P/2022/PA. Tk	Pemeriksaan setempat, pencatatan harta dan Penyempahan Wali	Perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur

Pelayanan Publik Lainnya

No	Jenis dan Nama Kegiatan	Tanggal dan Tempat Kegiatan	Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Manfaat dan Impact
1	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Terkait Kepailitan	22 Februari 2022, Ballroom Eboni , Hotel-Gammara -Makassar	50 (lima puluh)	Mensosialisasikan layanan BHP Makassar sebagai Kurator di dalam Kepailitan	Terlaksananya Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	Masyarakat memahami tugas dan fungsi BHP Makassar sebagai Kurator



					Terkait Kepailitan	Negara di dalam Kepailitan
2	Sosialisasi publikasi pada media digital di Radio Venus Makassar tahun anggaran 2022.	Tanggal 11 s.d. 18 April 2022	Para Pendengar Setia Radio Venus 97,6 FM	Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pendalaman materi secara utuh dan menyeluruh mengenai layanan pada Balai Harta Peninggalan Makassar dan hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri serta Instansi Terkait lainnya. Sedangkan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala pelaksanaan layanan tugas dan fungsi pada Balai Harta Peninggalan	Terlaksananya Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	Masyarakat memahami tugas dan fungsi BHP Makassar



					Makassar terkait instansi terkait meliputi Pengadilan Negeri/Agama, BPN, BPJS Ketenagakerjaan dan perbankan		
--	--	--	--	--	---	--	--

Matriks Kegiatan Rapat, Undangan Rapat dan RDK

No	Jenis kegiatan	Nomor	Perihal	Tanggal dan Tempat Kegiatan	Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Manfaat dan Impact
1	Rapat	Nomor; AHU.1.KU.01.01-65 tanggal 23 Juni 2022	Konsinyasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran	tanggal 4 s.d. 6 Juli 2022 di Episode Gading Serpong, Kabupaten Tangerang - Banten;	1. Mulyadi Arfah, S.H.M.H. 2. Dr. Efraim Tana, S.E.,S.H.,M.H.	Mengikuti Konsinyasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2022	Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran	Agar anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana kerja
		W.23-KU.02.04-2018. tanggal 19 Juli 2022.	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyelesaian Kerugian Negara serta Sosialisasi	pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi	1. Muh. Erwin, S.E 2. Haris Maulana Rahim, A.Md.Kom	Mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyelesaian Kerugian Negara serta Sosialisasi Standar Barang dan Standar	Mengetahui cara meminimalisir kerugian negara serta mengetahui standar barang dan kebutuhan organisasi	Mengetahui cara meminimalisir kerugian negara serta mengetahui standar barang dan kebutuhan organisasi



			Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Manusia Sulawesi Selatan ;		Kebutuhan (SBSK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan		
2	Undangan Rapat		Konsinyasi Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan	pada Rabu, 20 Juli s.d. Sabtu, 23 Juli 2022 bertempat di Mercure Jakarta Simatupang, Jakarta Selatan – DKI Jakarta;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasis Marollah, S.Sos.,M.H. 2. Irma Sari, S.E.,M.H. 3. Nurul Afiah Idrus, S.H. 	Konsinyasi Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan		
3	Undangan Rapat	SEK.3-KU.04.01-266 tanggal 12 Agustus 2022	Workshop Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	31 Agustus sd 2 September 2022 di Artotel Mangkuluhur Jakarta, Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3, DKI Jakarta;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanintya Mayantya, S.Ak. 2. Haris Maulana Rahim, AMd.Kom. 	Mengikuti kegiatan Workshop Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	Menerapkan Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan pada Kantor BHP makassar	Pelaporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan



4	Undangan Rapat	W.23- PR.02.04-142. tanggal 29 Agustus 2022.	kegiatan Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	tanggal 31 agustus s.d 1 September 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Siti Nurul Ajizah, A.Md.	Mengikuti kegiatan Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di	Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di
5	Undangan Rapat	SEK.3-KU.04.01-266 tanggal 12 Agustus 2022	Workshop Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	31 Agustus sd 2 September 2022 di Artotel Mangkuluhur Jakarta, Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3, DKI Jakarta;	3. Sanintya Mayantya, S.Ak. 4. Haris Maulana Rahim, AMd.Kom.	Mengikuti kegiatan Workshop Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	Menerapkan Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan pada Kantor BHP makassar	Pelaporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
6	Undangan Rapat	W.23- PR.02.04-142. tanggal 29 Agustus 2022.	kegiatan Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah	tanggal 31 agustus s.d 1 September 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Siti Nurul Ajizah, A.Md.	Mengikuti kegiatan Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian	Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di	Supervisi RKA-KL Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 di



			Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan		Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan		
7	Undangan Rapat	Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor W.23.OT.01.01-89 tanggal 01 September 2022	perihal Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Beban Kerja melalui Aplikasi e-AB	tanggal 15 September 2022 Kanwil Sulawesi Selatan	Ahmad Rizal, S.H	Mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Beban Kerja melalui Aplikasi e-ABK pada hari Kamis, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Penyusunan Analisis Beban Kerja melalui Aplikasi e-ABK	Dapat mengetahui Penyusunan Analisis Beban Kerja melalui Aplikasi e-ABK
8	Undangan Rapat	Surat PLH. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor: W.23.AH.01.02-156 tanggal 30 Agustus 2022	Undangan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris Tahun Anggaran 2022.	tanggal 12 s.d 13 September 2022 di Hotel Claro Makassar	1. Mulyadi Arfah 2. A. Malika	Mengikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris Tahun Anggaran 2022 di Hotel Claro Makassar yang akan dilaksanakan.	Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris	Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris
9	Undangan Rapat	Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Nomor : W.23-KU.01.02- 288.	kegiatan Refreshment Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran dan Kebutuhan Belanja Pegawai di	8 September 2022 Kanwi Sulsel	1. Sanintya Mayantya, S.Ak 2. Asriani Adam	Mengikuti kegiatan Refreshment Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Kebutuhan Belanja Pegawai	Mengikuti kegiatan Refreshment Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan	Mengikuti kegiatan Refreshment Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan



		tanggal 5 September 2022.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan				Kebutuhan Belanja Pegawai	Kebutuhan Belanja Pegawai
10	Undangan Rapat	Surat Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W.10-HH.04.02-42 tanggal 22 September 2022.	seminar kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta	tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2022 di The Papandayan Hotel, Jl. Gatot Subroto No. 83, Malabar, Lengkong, Kota Bandung;		Mengikuti Seminar Kepailitan dengan tema: Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan dan Kedudukannya terhadap Sita Pidana	Memahami Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan	Meningkatkan Pemahaman ttg Kepailitan



a. Publikasi/pameran/helpdes

Kegiatan Penyebaran Informasi Layanan Balai Harta Peninggalan mencakup kegiatan pengadaan pencetakan sarana informasi, berupa spanduk. Sarana informasi tersebut diadakan dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan tugas fungsi BHP baik dari segi administrasi dan juga teknis. Sarana tersebut ditujukan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik dan bagi instansi terkait dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas fungsi antara lain :

- data jumlah pengadaan cetak yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	Jenis Cetakan	Jumlah (unit/exp)	Anggaran
1	Buku Saku	200 Paket	10.000.000
2	Kalender	100 Paket	9.550.000

- data Publikasi pada media

NO	Uraian	Jumlah (unit/exp)	Realisasi	Anggaran
1	Publikasi pada media digital/ Radio	5 Paket	5 Paket	25,000,000
2	Publikasi pada media Televisi [1 PKT]	1 Paket	1 Paket	13,000,000
4	Publikasi pada media Cetak	1 Paket	1 Paket	15,000,000

LAYANAN PERKANTORAN

➤ Gaji dan Tunjangan

Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2022 terdiri dari pembayaran:

- a. Gaji Pokok, dibayarkan setiap awal bulan dari Januari 2022 – Desember 2022;



- b. Tunjangan Umum, dibayarkan setiap awal bulan dari Januari 2022– Juni 2022;
 - c. Tunjangan Struktural, dibayarkan setiap awal bulan dari Januari 2022 – Desember 2022;
 - d. Tunjangan Suami/Istri, dibayarkan setiap awal bulan dari Januari 2022 – Desember 2022;
 - e. Tunjangan Anak, dibayarkan setiap awal bulan dari Januari 2022 – Desember 2022;
 - f. Tunjangan Uang Makan, diajukan terpisah dengan Pengajuan Gaji dan dibayarkan sesuai dengan Tunjangan Beras, dibayarkan setiap awal bulan dari Januari 2022– Desember 2022;
- **Oprasional Pelaksanaan Kantor**
- Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran hampir seluruhnya dilaksanakan secara rutin setiap bulan, namun ada beberapa sub komponen yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali kegiatan seperti Pengadaan Pakaian Dinas. Berikut rincian pengelolaan dari sub komponen yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2022.
- a. *Kesehatan Pegawai*

Dalam mendukung kesehatan pegawai, dilaksanakan kegiatan pengadaan obat-obatan dan penambah daya tahan tubuh. Berikut kegiatan pengadaan obat-obatan dan daya tahan tubuh yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022:
 - b. *Baju Dinas*

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai secara fisik, yang menjadi tuntutan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Pengadaan pakaian dinas tersebut tidak hanya diperuntukan bagi pegawai namun juga bagi tenaga honorer, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Pramubakti. Pakaian Dinas terdiri dari 2 (dua) stell, yaitu 2 Stell Pakaian Dinas Harian (PDH) + Badge.



Pengadaan Pakaian Dinas Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Berikut data target dan realisasi pengadaan pakaian dinas pegawai pada Tahun 2022:

No	Nama Barang	Vol	Satuan	Satuan Harga(Rp)	Jumlah Harga(Rp)
1	Pakaian Dinas harian untuk 28 Pegawai	56 Psg	2 Stell	727.000	44.783.200
2	Pakaian Dinas Pramubhakti untuk 2 Orang	4 Psg	2 Stell	418.000	1.839.000
3	Pakaian Dinas Satuan Pengamanan untuk 3 Orang	6 Psg	2 Stell	727.000	4.798.200
4	Pakaian Dinas Cleaning Service Untuk 2 Orang	4 Psg	2 Stell	354.000	1.557.000
Total....					52.978.000

c. Pemeliharaan Gedung

Kegiatan pemeliharaan bangunan kantor yang ada pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar selama Tahun 2022:

No	Uraian Pekerjaan	Nomor dan Tanggal SPK	Nomor dan Tanggal BASTP
1	Pemeliharaan halamam	W.23.AHU.AHU. 2-PB.02.03-34 /2022	W.23.AHU.2-PB.02.03 - 42/2022
2	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Tanggal 11 maret 2022	Tanggal 25 maret 2022

d. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Kegiatan Perbaikan/Pemeliharaan Barang Inventaris bertujuan untuk menjaga/memelihara kondisi barang inventaris baik secara fisik maupun nilainya. Kegiatan ini melibatkan fungsi Urusan Umum sebagai bagian dari



pengawasan kerumahtanggan, yang kemudian dilaporkan kepada Kasub.Bag Tata Usaha untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Alokasi anggaran untuk kegiatan inipun memiliki akun tersendiri dalam RKA-KL DIPA yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Adapun target barang inventaris yang dianggarkan memperoleh perawatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang Inventaris	Jumlah Target	Realisasi
1	Laptop	8 Unit	8 Unit
2	Pc Dekstop	15 Unit	15 Unit
3	Printer	10 Unit	10 Unit
4	FAX	2 Unit	2 Unit
5	Pemeliharaan Ac Split	14 unit	14 unit
6	Mesin Fotocopy	1 Unit	1 Unit
7	Ac Sentral	2 Unit	2 Unit

Berikut adalah Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun 2022:



AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		PER31 DESEMBER 2021	
KODE	URA		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		515	2,785,057,467	23	176,805,000	7	42,040,000	531	2,919,822,467
3.01.03.05.01	Pompa Air	Unit	2	9,100,000	0	0	0	0	2	9,100,000
3.02.01.02.00	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	475,684,450	0	0	0	0	4	475,684,450
3.02.01.04.00	Sepeda Motor	Unit	5	74,569,000	1	18,255,000	0	30,000	6	92,794,000
3.05.01.01.00	Mesin Ketik Listrik	Buah	1	3,949,000	0	0	0	0	1	3,949,000
3.05.01.02.00	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3.05.01.03.00	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	14,994,736	0	0	0	0	1	14,994,736
3.05.01.04.00	Lemari Besi/Metal	Buah	8	59,817,600	2	11,000,000	0	0	10	70,817,600
3.05.01.04.00	Lemari Kayu	Buah	15	2,855,000	0	0	0	0	15	2,855,000
3.05.01.04.00	Filing Cabinet Besi	Buah	10	30,195,000	0	0	0	0	10	30,195,000
3.05.01.04.00	Brandkas	Buah	2	15,432,000	0	0	0	0	2	15,432,000
3.05.01.05.00	Tabung Pemadam Api	Buah	0	0	4	3,200,000	2	1,600,000	2	1,600,000
3.05.01.05.00	CCTV - Camera Control Television System	Buah	4	20,732,000	2	12,000,000	0	0	6	32,732,000
3.05.01.05.01	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3.05.01.05.01	Mesin Absensi	Buah	2	19,950,000	0	0	0	0	2	19,950,000
3.05.01.05.04	LCD Projector/Infocus	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3.05.02.01.00	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	10	35,670,000	0	0	0	0	10	35,670,000
3.05.02.01.00	Meja Kerja Kayu	Buah	33	145,593,600	0	0	0	0	33	145,593,600
3.05.02.01.00	Kursi Besi/Metal	Buah	198	122,505,500	0	0	0	0	198	122,505,500
3.05.02.01.00	Sice	Buah	25	146,091,500	0	0	0	0	25	146,091,500
3.05.02.01.00	Meja Rapat	Buah	16	45,608,900	5	23,750,000	0	0	21	69,358,900



AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	U		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.03.0	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3.05.02.03.0	Air Cleaner	Buah	2	5,480,000	0	0	0	0	2	5,480,000
3.05.02.04.0	Lemari Es	Buah	1	2,500,000	1	4,0	0	0	2	6,500,000
3.05.02.04.0	A.C. Split	Buah	24	199,710,000	0	0	0	0	24	199,710,000
3.05.02.04.0	Kipas Angin	Buah	2	841,000	0	0	0	0	2	841,000
3.05.02.06.0	Televisi	Buah	12	61,565,000	0	0	0	0	12	61,565,000
3.05.02.06.0	Loudspeaker	Buah	4	6,300,000	0	0	0	0	4	6,300,000
3.05.02.06.0	Sound System	Buah	1	13,640,000	2	43,0	0	0	3	56,640,000
3.05.02.06.0	Microphone Table Stand	Buah	5	2,500,000	0	0	0	0	5	2,500,000
3.05.02.06.0	Stabilisator	Buah	2	2,000,000	0	0	0	0	2	2,000,000
3.05.02.06.0	Tangga Aluminium	Buah	0	0	1	2,5	0	0	1	2,500,000
3.05.02.06.0	Mimbar/Podium	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
3.05.02.06.0	Karpet	Buah	3	9,000,000	0	0	0	0	3	9,000,000
3.05.02.06.0	Gordyin/Kray	Buah	29	25,300,000	0	0	0	0	29	25,300,000
3.05.02.06.9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	1,040,000	0	0	0	0	1	1,040,000
3.06.01.01.0	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	2,100,000	0	0	0	0	3	2,100,000
3.06.01.02.1	Camera Digital	Buah	4	33,088,000	0	0	0	0	4	33,088,000
3.06.02.01.0	Facsimile	Buah	3	8,645,000	0	0	0	0	3	8,645,000
3.06.03.47.0	Genset	Buah	1	32,000,000	0	0	0	0	1	32,000,000
3.07.01.01.0	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran	Buah	1	1,924,000	1	1,5	0	0	2	3,424,000
3.08.03.06.0	Infrared Thermometer	Buah	1	1,500,000	0	0	1	1,	0	0
3.10.01.02.0	P.C Unit	Buah	23	295,037,179	4	57,6	4	38,	23	313,727,179
3.10.01.02.0	Lap Top	Buah	13	166,109,320	0	0	0	0	13	166,109,320



AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1
3.10.02.02.0	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	11,660,000	0	0	0	0	2	11,660,000
3.10.02.03.0	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	132,354,682	0	0	0	0	28	132,354,682
3.10.02.03.0	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	19,964,000	0	0	0	0	2	19,964,000
3.10.02.04.0	Server	Buah	2	435,941,000	0	0	0	0	2	435,941,000
3.10.02.04.0	Rak Server	Buah	1	5,830,000	0	0	0	0	1	5,830,000
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		2	2,313,286,000	0	985,820,067	0	0	2	3,299,106,067
4.01.01.01.0	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	2,218,222,000	0	238,925,000	0	0	1	2,457,147,000
4.01.02.01.0	Rumah Negara Golongan I Tipe C	Unit	1	95,064,000	0	746,895,067	0	0	1	841,959,067
135121	ASET TETAP LAINNYA		4	470,243	0	0	0	0	4	470,243
6.01.01.01.0	Monografi	Buah	4	470,243	0	0	0	0	4	470,243
TOTAL				50,579,583,710		1,162,625,067		42,040,000		51,700,168,777



e. *Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6*

No	Nama Barang Inventaris	Jumlah Target	Realisasi
1	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	5 Unit
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	4 Unit
3	Service Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	5 Unit
4	Service Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	4 Unit

f. *Langganan Daya dan Jasa*

Kegiatan Langganan Daya dan Jasa pada dasarnya merupakan kegiatan yang mendasar atau rutinitas pada seluruh instansi. Begitu pula yang ada pada Balai Harta Peninggalan Makassar, kegiatan telah disediakan akun secara rinci, yaitu:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat;
- Belanja Langganan Listrik;
- Belanja Langganan Telepon;
- TV Langganan
- Belanja Langganan Daya Jasa Lainnya

g. *Keperluan Perkantoran*

Adapun data Tenaga Honorer pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022, sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal SK	Nama Tenaga Honorer	Keterangan
1	W.23.AHU.2.UM.01.01.03 - 25 Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022	A. Fajrin Tri Susanto,S.E	Tenaga Honorer Pramubakti
2	W.23.AHU.2.UM.01.01.03 - 25 Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022	A. Sudirman	Tenaga Honorer



			Penjaga Keamanan
3	W.23.AHU.2.UM.01.01.03 - 25 Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022	Arifin	Tenaga Honorer Penjaga Keamanan
4	W.23.AHU.2.UM.01.01.03 - 25 Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022	Haerul	Tenaga Honorer Penjaga Keamanan
5	W.23.AHU.2.UM.01.01.03 - 25 Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022	Steven Randa Lembang	Tenaga Honorer Jasa Kebersihan
6	W.23.AHU.2.UM.01.01.03 - 25 Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022	Tri Naldy Balia	Tenaga Honorer Jasa Kebersihan

h. Honor Operasional Kantor

No	Nomor dan Tanggal SK	Nama Pegawai	Nama Jabatan
1	W.23.AHU.2.-KU.03.03-05 /2021 Tanggal 3 Januari 2022	Efraim Tana, SE,SH,MH	Pejabat Pembuat Komitmen
2		Siti Jusniah	Pejabat SPM
3	W.23.AHU.2.-PB.05.06-01 /2022 Tanggal 3 Januari 2022	Haris Maulanan rahim	Operator Simak
4	W.23.AHU.2.-KU.03.03-04 /2021 Tanggal 4 Januari 2022	Shanintya Mayantya	Operator Saiba
5	W.23.AHU.2.-KU.03.03-04 /2021 Tanggal 4 Januari 2021	Nurul Afiah Idrus	Belanja Pegawai
6	W.23.AHU.2.-KU.03.03-04 /2020 Tanggal 3 Januari 2021	Titi sunarti	Pengelola Keuangan
7		Raodah	Pengelola Keuangan
8		Sanintya Mayantya	Pengelola Keuangan
9		Siti Nurul Ajizah,Amd	Pengelola Keuangan
10		Raoda	Bendahara Penerima



11	W.23.AHU.2.-KU.03.03-01 /2022 Tanggal 3 Januari 2022	Muh.Erwin,SE	Bendahara Pengeluaran
----	--	--------------	-----------------------

i. Jamuan Tamu

Alokasi anggaran diperuntukan bagi pembelian konsumsi dalam rangka jamuan tamu dan penyelenggaraan rapat selama Tahun 2022. Adapun penyelenggaraan kegiatan jamuan tamu dan kegiatan rapat yang dilaksanakan selama Tahun 2022, sebagai berikut:

NO	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Ujian Kompetensi JFKK	25 Maret – 4 April 2022
2	Pendampingan penyusunan Manajemen resiko	20 Juni s.d 1 Juli 2022
3	Kegiatan Keuangan dan BMN	14 – 18 November 2022

j. Belanja Sewa

Kegiatan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas BHP pada Tahun 2022, diantaranya :

No	Kegiatan	Nomor dan Tanggal SPK	Waktu Pelaksanaan	Anggaran
1	Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotocopy	Nomor Faktur 17003704948 Tanggal 3 November 2022	12 Bulan	35.997.300

LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL

Penyelenggaraan Output Layanan Perencanaan Internal pada Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun Anggaran 2021 seluruhnya bersumber dari pagu anggaran PNPB, yang terdiri dari banyak komponen, yaitu Perjalanan Dinas pada tiap kegiatan dukungan administratif, termasuk penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor..



5 Penyusunan Anggaran

Penyusunan Rencana Anggaran yang dimaksud dalam bagian ini adalah kesesuaian antara Penyusunan Kegiatan RKAKL pada awal tahun dan akhir tahun. Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada indikator Penyusunan Rencana Anggaran, diantaranya:

1. Penyusunan RKAKL Tahun 2022
2. Penerbitan DIPA Petikan Tahun 2022;
3. Penyusunan Rencana Penyerapan Anggaran (disbursemet plan);
4. Penyusunan Kalender Kerja; dan
5. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan).

Dalam realisasinya, pelaksanaan kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pada awal tahun yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu satu tahun anggaran.

Namun seiring dengan perjalanan tahun anggaran, tidak seluruh perencanaan dapat dilaksanakan, dan harus melalui beberapa perubahan dikarenakan hambatan-hambatan yang mempengaruhi. Perubahan yang dilakukan terdapat pada rincian kegiatan ataupun alokasi anggaran yang dilakukan melalui Revisi Anggaran.

Berikut adalah data Revisi Anggaran yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar selama Tahun 2022, diantaranya:

No	Jenis Revisi Anggaran	Nomor dan Tanggal Pengesahan Revisi
1	Revisi POK 1	SP DIPA- 013.03.2.408432/2022 tanggal 15 februari 2022
2	Revisi POK 2	SP DIPA- 013.03.2.408432/2022 tanggal 18 April 2022
3	Revisi POK 3	SP DIPA- 013.03.2.408432/2022 tanggal 17 Mei 2022



4	Revisi POK 4	SP DIPA-013.03.2.408432/2022 tanggal 15 Juli 2022
5	Revisi POK 5	SP DIPA013.03.2.408432/2022 tanggal 19 Oktober 2022

6 *Pelaksanaan Anggaran*

7 *Akuntansi dan Pelaporan*

8 *Perbendaharaan*

LAYANAN UMUM

Penyelenggaraan Output Layanan Umum pada Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun Anggaran 2022 seluruhnya bersumber dari pagu anggaran PNBPN, yang terdiri dari banyak komponen, yaitu Perjalanan Dinas pada tiap kegiatan dukungan administratif, pelaksanaan urusan rumah tangga, Pencegahan dan Penanganan covid-19

➤ *Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga*

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga BHP pada Tahun 2021, diantaranya, Belanja Honor Operational Satker, belanja Non Operasional, belanja sewa, belanja sewa lainnya, belanja persediaan peralatan dan mesin dan pengadaan Sewa Roda 4 dan digitalisasi arsip;

a. Belanja Honor Operational Satker

No	Nomor dan Tanggal SK	Nama Pegawai	Nama Jabatan
1	W23.AHU.2-KU.03.03-06 Tahun 2022	Ramli, S.H,M.H	Pejabat Pengadaan

b. Belanja Non Operasional



No	Uraian	Unit	Waktu
1	Langganan Internet	1 Paket	12 Bulan
2	BBM Kendaraan Sewa Mobi	1 Unit	12 Bulan

c. Belanja sewa,

Telah dilaksanakan Pengadaan Sewa kendaraan Roda 4

Jenis Barang dan Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Total Sebelum Pajak	Total Setelah Pajak
Pengadaan Sewa Kendaraan roda 4	Bulan	10.0	6.354.545	63.545450	69.899.995

d. Pengadaan Digitalisasi Arsip

Telah dilaksanakan Pengadaan Digitalisasi Arsip Data boedel Balai Harta peninggalan Makassar T.A 2022.

Nama pekerjaan	Harga Satuan	Volume	Sub Total (Rp)	Total
Digitalisasi Dokumen Harta Peninggalan di Aplikasi Internal	2.900	60.100 Lembar	174.290.000	174.290.000
Total				174.290.000
PPN 10%				17.429.000
Grand Total				191.719.000

e. Belanja persediaan peralatan dan mesin

No	Uraian	Unit	Waktu
1	Catridge	1 Paket	12 Bulan
2	Tinta Printer	1 Paket	12 Bulan



➤ Pencegahan dan penanganan Covid-19

Kegiatan Pencegahan dan penanganan Covid-19 BHP Makassar pada Tahun 2022, diantaranya:

No	Uraian	Waktu	Ket
1	Masker	12 Bulan	
2	Hand Sanitizer	12 Bulan	
2	Sabun Cuci Tangan	12 Bulan	
3	Pembelian Vitamin suplemen makanan	12 Bulan	

LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

Penyelenggaraan Output Sarana dan Prasarana internal pada Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun Anggaran 2022 seluruhnya bersumber dari pagu anggaran PNPB, yang terdiri dari banyak komponen, yaitu pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan.

a. Layanan Sarana Internal

1. Telah dilaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan informasi dengan nomor pesanan W23.AHU.AHU.2.PB.02.03-16 tanggal 14 februari 2022 dengan rincin sebagai berikut;

Jenis Barang	Unit	Vol	Harga Satuan (Rp)	Pajak (%)	Total Harga (Rp)
Laptop	Unit	6	15.400.000	10.0	101.640.000

2. Telah dilaksanakan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pada Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar TA 2022 untuk bulan Februari dua ribu dua puluh dua sesuai dengan Adendum Surat Pesanan Nomor W23.AHU.AHU2.PB.02.03-63 tanggal 18 Mei 2022

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
4912100001-KB2-001370263 KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN	1 unit	Rp 438.700.000	Rp 438.700.000



3. Telah dilaksanakan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan surat pesanan Nomor; W23.AHU.AHU..2PB.02.03 -19 tanggal 14 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut;

Jenis Barang	Unit	Vol	Harga Sat (Rp)	PPN (%)	Total Harga (Rp)
LCD Protector	Unit	1	7.150.000	10.0	7.865.000
Mic conference	Unit	4	500.000	10.0	2.200.000
Fire Alarm	Unit	1	500.000	10.0	550.000
Tiang Bendera	Unit	1	2.500.000	10.0	2.750.000
Meja Kerja kayu	Unit	5	3.199.000	10.0	17.594.500
Kursi pejabat	Unit	10	2.750.000	10.0	30.250.000
Total Nilai					58.767.500

- b. Layanan prasarana Internal

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

Telah dilaksanakan Pengadaan jasa konsultan perencanaan Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar TA 2022 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor W23.AHU.AHU2.PB.02.03-52 tanggal 09 April 2022 dengan total biaya Rp. 96.900.000,-

ada pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar selama Tahun 2021:

No	Uraian Pekerjaan	Nomor dan Tanggal SPK	Nomor dan Tanggal BASTP	Anggaran
1	Pengadaan jasa konsultan perencanaan Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Balai Harta Peninggalan	W.23.AHU.AHU.2-PB.02.03- 37 /2022 Tanggal 11 maret 2022	W.23.AHU.2-PB.02.03-52/2021 Tanggal 09 April 2022	96,900,000
2	Konsultasi pengawasan Renovasi Gedung	W.23.AHU.AHU.2-PB.02.09 - 78 /2022 Tanggal 8 juni 2022		59,500,000
3	Pengelolaan kegiatan			30,275,000



4	Pelaksanaan Konstruksi Renovasai gedung kantor BHP Makassar	W.23.AHU.AHU. 2-PB.02.09 - 78 /2022 Tanggal 8 juni 2022	W.23.AHU.2- PB.02.09- 164/2022 Tanggal 10 Oktober 2022	719,644,879
---	---	---	---	-------------

LAYANAN SDM

Penyelenggaraan Output Layanan SDM pada Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun Anggaran 2022 seluruhnya bersumber dari pagu anggaran PNBP, yang terdiri dari komponen, yaitu Perjalanan Dinas pada tiap kegiatan dukungan Administrasi kepegawaian dan Sosialisasi di Bidang Kepegawaian.

- Admistrasi Kepegawaian
- Sosialisasi di Bidang Kepegawaian.

B. Akuntabilitas Kinerja keuangan (Realisasi Anggaran)

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2,147,459,000	1.833.608.546	85.39	313.850.454	14.61
2	Belanja Barang	2,664,256,000	2.576.560.390	96.71	87.695.610	3.29
3	Belanja Modal	1,523,984,000	1.505.427.397	98.78	18.556.621	1.22
Total		6,335,699,000	5.915.596.315	93.37	420.102.685	6.63



BULAN	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
	PAGU (a)	REALISASI (b)	% l= (b)⊗a	PAGU (d)	REALISASI (e)	% (f)= (e)⊗d	PAGU (g)	REALISASI (h)	% (i) = (h)⊗g	PAGU (j)	REALISASI (k)	% (l)= (k)⊗j
PAGU	2,147,459,000			2,664,256,000			1,523,984,000			6,335,699,000		
Januari		120,054,349	5.59		0	0		0	0		120,054,349	1.89
Pebruari		140,656,349	6.55		53,894,200	2.02		0	0		194,550,549	3.07
Maret		152,274,564	7.09		494,714,215	18.57		160,407,500	10.53		807,396,279	12.74
April		261,784,558	12.19		245,968,689	9.23		96,900,000	6.36		604,653,268	9.54
Mei		123,989,709	5.77		201,948,588	7.58		215,893,464	14.17		541,831,774	8.55
Juni		250,652,891	11.67		203,939,340	7.65		125,937,853	8.26		580,530,103	9.16
Juli		130,172,429	6.06		234,253,729	8.79		125,937,853	8.26		490,364,011	7.74
Agustus		131,416,429	6.12		235,927,751	8.86		125,937,853	8.26		493,282,033	7.79
september		123,989,709	5.77		201,948,588	7.58		215,893,464	14.17		541,831,774	8.55
Oktober		132.082.329	6,15		272.368.512	10,22		215.712.856	14,15		620.163.713	9,79
November		128.534.429	5,99		158.109.150	5,93		0	0		286.643.585	4,52
Desember												
JUMLAH		1.833.608.546	85.39		2.576.560.390	96.71		1.505.427.397	98.78		5.915.596.315	93.37
SISA PAGU		313.850.454	14.61		87.695.610	3.29		18.556.621	1,22		420.102.685	6.63



2. Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, yaitu dari Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar, yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Kegiatan yang dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	UPT	Capaian PNBPA TA. 2021	Capaian PNBPA TA. 2022
1	Balai Harta Peninggalan Makassar	Rp 23.300.000,-	Rp. 15.680.000,-

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa target Pendapatan dan realisasi seperti pada tabel, yang menunjukkan Pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendukung keberhasilan pembangunan telah maksimal dengan adanya *pandamik covid-19*.

3. Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi Anggaran	Ket
BELANJA :				
a. Belanja Pegawai	2,147,459,000	1.833.608.546	85.39	
b. Belanja Barang	2,664,256,000	2.576.560.390	96.71	
c. Belanja Modal	1,523,984,000	1.505.427.397	98.78	
d. Pembayaran Bunga Hutang	0	0	0	
e. Subsidi	0	0	0	
f. Hibah	0	0	0	
g. Bantuan Sosial	0	0	0	
h. Belanja Lain-lain	0	0	0	
JUMLAH	6,355,011,000	5.915.596.315	93.37	



4. Pembiayaan

Mengenai masalah pembiayaan, Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta tidak mempunyai anggaran dan realisasinya atau bernilai nol. Pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Pembiayaan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar per tanggal 31 Desember 2022 :

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi diatas (bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
PEMBIAYAAN :				
1. Pembiayaan Dalam Negeri (NETO):	0	0	0	0
a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0
b. Non Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0
2. Pembiayaan Luar Negeri (NETO) :	0	0	0	0
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri	0	0	0	0
Jumlah Pembiayaan	0	0	0	0

5. Aset

Pada neraca Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022 total aset bernilai **Rp. 49.462.490.458,-** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel Aset Kantor Balai Harta Peninggalan per tanggal 31 Desember 2022

NO	NAMA PERKIRAAN	JUMLAH (Rupiah)
1	ASET LANCAR :	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000
	Kas Lainnya dan Setara Kas	
	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	



	Persediaan	984.000
	Persediaan yang Belum Diregister	
	JUMLAH ASET LANCAR	60.984.000
2	ASET TETAP :	
	Tanah	45.480.770.000
	Peralatan dan Mesin	2.886.022.467
	Gedung dan Bangunan	3.299.106.067
	Aset tetap lainnya	470.243
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.194.353.816)
	JUMLAH ASET TETAP	49.363.915.925
3	ASET LAINNYA :	
	Aset Tak Berwujud	52.771.600
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(35.181.067)
	JUMLAH ASET LAINNYA	17.590.533
	JUMLAH SELURUH ASET	49.462.490.458

6. Kewajiban

Kewajiban pada Neraca Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Kewajiban Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar per tanggal 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH (Rupiah)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	
Utang kepada Pihak Ketiga	0
Uang Muka dari KPPN	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0
JUMLAH SELURUH KEWAJIBAN	0

7. Ekuitas Dana

Ekuitas dana yang disajikan pada Neraca Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Ekuitas Dana Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar per tanggal 31 Desember 2022



NAMA PERKIRAAN	JUMLAH (Rupiah)
EKUITAS:	
Ekuitas	49.462.490.458
JUMLAH EKUITAS	49.462.490.458

8. Laporan SAI (SAK dan SABMN)

Berikut ini adalah rincian Berita Acara Rekonsiliasi yang berhasil dilakukan oleh Operator SIMAK-BMN dengan KPKNL Makassar Tahun 2022:

No.	Tahun 2021	Nomor Berita Acara Rekonsiliasi	Tanggal
1	Semester I	W.23.AHU.AHU.2-PB.05.02-91	9 Juli 2022
2			

Berikut ini adalah rincian Berita Acara Rekonsiliasi yang berhasil dilakukan oleh Operator SAIBA dengan KPPN Makassar Tahun 2021:

No.	Tahun 2022	Nomor Berita Acara Rekonsiliasi	Tanggal
1	Semester I	BAR-25950/WPB.23/KP.136/2022	13 Juli 2022
2	Semester II		



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum kegiatan di Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sampai akhir Desember Tahun 2022, serapan anggaran di Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar disekitar angka **93.37%** (*sembilan puluh koma delapan puluh tujuh persen*) telah mencerminkan pencapaian hasil kerja baik out put dan out come yang sesuai dengan dan biaya atau input yang dikeluarkan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu adanya tindak lanjut, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar divisi pelayanan hukum dan ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui pelaksanaan rapat kerja secara periodic.
2. Pelaksanaan kinerja harus mengacu pada rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
3. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT atau e-Government.
4. Realisasi anggaran dengan tingkat penyerapan yang tinggi diawal tahun anggaran.
5. Bersama-sama mewujudkan Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).



6. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar.
7. Diperlukan rapat koordinasi dan diskusi-diskusi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk dapat memaksimalkan peran Balai Harta Peninggalan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, dari uraian tersebut diatas berikut ini disampaikan beberapa catatan rencana tindak lanjut hal-hal yang harus dilakukan oleh Jaringan Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Perlunya meningkatkan komitmen antara bagian Teknis dan bagian Administrasi di Jaringan Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jaringan Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar;
- c. Penetapan tujuan dan sasaran strategis harus menjadi pelajaran dalam rangka meningkatkan Jaringan Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar; pada periode berikutnya;
- d. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Memaksimalkan programe-government pada Tahun 2022 untuk mewujudkan Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar yang terbuka, mendorong partisipasi rakyat, serta peningkatan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif guna mewujudkan good governance.



Akhirnya, sesuai amanah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 – 2024, jajaran Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Tahun 2022. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar, yakni dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundangundangan.

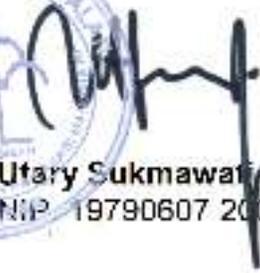
Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar, kendala/ hambatan serta rencana tindak lanjut pada Tahun 2022. Berdasarkan kinerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar diukur berpenilaian keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar Tahun 2022. Hasil capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Akhirnya dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar, dengan demikian, dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode/ tahun berikutnya. Jajaran Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar, berharap agar kehadiran LKjIP tersebut senantiasa menjadi motivator dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya harapannya ialah, Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan maksimal, dengan senantiasa menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang ada dengan tuntutan perkembangan zaman.



Demikian laporan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Januari 2023


Kepala

Utary Sukmawati Syarif
NIP. 19790607 200501 2 002



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Koordinasi PN Papua Barat	
2	Koordinasi PN Ambon	
3	Tindak Lanjut Penyempahan Perwalian Ambon	



4	Koordinasi ke PN Bone	
5	Tindak lanjut Penyempahan PN Bone	
6	Tindak lanjut Penyempahan PN Bone	



7	Koordinasi PN Gorontalo	 <p>The collage consists of four photos. The top-left photo shows a meeting in progress with several people seated around a table. The top-right photo shows a group of officials in uniform standing in a room. The bottom-left photo shows a group of officials in uniform standing in front of a building entrance. The bottom-right photo shows a group of officials in uniform standing in a room, possibly during a presentation or meeting.</p>
8	Penyempahan Wali Provinsi Gorontalo	 <p>The photograph shows three men in light blue uniforms and one woman in a patterned dress and headscarf. One of the men is presenting a certificate or document to the woman. They are standing in a room with a table in front of them.</p>
8	Sosialisasi Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Terkait Kepailitan	 <p>The photograph shows a socialization event. A banner in the background reads: "SOSIALISASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN TERKAIT KEPAILITAN TAHUN 2022". Below the banner, several people are standing on a stage, and a man in a patterned shirt is speaking into a microphone. The event is held in a room with a red carpet and a blue table.</p>



9	Renovasi kantor 2022	
10	Kegiatan sosialisasi melalui talk show di radio venus terkait HARTA TAK TERURUS	